

MEMO HUKUM

ALVIN HARMAN BONARDO S.

CARA MEMPEROLEH HAK ATAS TANAH DIATAS LAHAN EX JAWATAN PERKERETAAPIAN BELANDA (STUDI KASUS DI WILAYAH SEMUT BARU SURABAYA)



KK.
Per. 2260/97.
ALP.
e

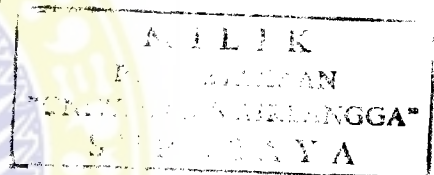
MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997

**CARA MEMPEROLEH HAK ATAS TANAH DIATAS LAHAN
EX JAWATAN PERKERETAAPIAN BELANDA
(STUDI KASUS DI WILAYAH SEMUT BARU SURABAYA)**



KK
Per. 2260/97
ALY.
c



MEMO HUKUM

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Pembimbing,

Eman Ramelan, SH., MS.

Nip. 131 286 715

Penyusun,

Alvin Harman Bonardo S.

NIM. 039113429

Memo Hukum ini telah diuji pada :

H a r i : Jum'at

Tanggal : 24 Januari 1997

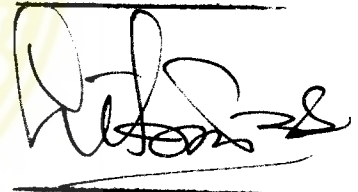
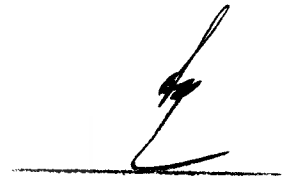
Tim Penguji

1. Ketua : Soedaihar, SH.

2. Sekretaris : Sumardji, SH., M.Hum

3. Anggota : Eman Ramelan, SH., MS.

Lisman, SH., MS.



V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari rangkaian pembahasan mengenai permasalahan sengketa tanah di wilayah Semut Baru, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. Status tanah di wilayah Semut Baru yang menjadi sengketa antara Perumka DAOP VIII dengan warga masyarakat setempat adalah tanah negara. Sehingga bila perumka ingin menguasai tanah tersebut (untuk mendapatkan hak pengelolaan) harus berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Th. 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Th. 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Atas Tanah.
2. Status tanah Semut Baru adalah tanah negara, oleh karena itu secara yuridis warga tidaklah memiliki lahan milik Perumka sebab tanah itu menjadi tanah yang bebas. Warga yang tinggal berpuluh-puluh tahun di wilayah Semut Baru dapat memperoleh hak atas tanah tersebut, dengan cara mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah ke Badan Pertanahan Kotamadya Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Th. 1973 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Th. 1972.

B. SARAN

1. Untuk memperoleh status tanah yang jelas di wilayah Semut Baru hendaknya Perumka berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah ada (PMDN NO. 5 Th. 1973 dan PMDN No. 6 th. 1972), sehingga bila terjadi sengketa tentang status kepemilikan tanah di wilayah Semut Baru tersebut Perumka telah mempunyai bukti-bukti otentik, yang dapat dijadikan dasar atas hak kepemilikan tanah.
2. Meskipun warga telah tinggal di wilayah Semut Baru selama puluhan tahun (turun temurun), mereka hendaknya juga mengajukan hak atas tanah ke Badan Pertanahan Kotamadya Surabaya. Hal ini akan lebih menguatkan hak kepemilikan mereka apabila terjadi sengketa.